

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Jatuhnya orde baru yang sekaligus mengakhiri kekuasaan Soeharto yang otoriter memberikan ruang yang lebih besar terhadap kebebasan, khususnya dalam mengutarakan pendapat pada panggung politik di Indonesia. Kebebasan ini salah satunya ditandai dengan adanya ruang publik yang bebas sebagai sarana dalam mengemukakan aspirasi sehingga menumbuhkan semangat *civil society* yang kritis dan mampu berhadapan dengan negara ketika negara melakukan diskriminasi untuk mengedepankan nilai-nilai demokrasi. Pemerintah mulai dapat dikritisi oleh masyarakat sehingga masyarakat memiliki peran aktif dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Proses dialog pun tercipta antara pemerintah, sektor privat, dan masyarakat pasca orde baru hingga saat ini dimana *civil society* di Indonesia terus berkembang dan semakin dewasa. Pada gilirannya, mustahil berbicara mengenai perpolitikan di Indonesia hari ini tanpa melibatkan *civil society* di dalamnya.

Keseriusan *civil society* tercermin dalam kasus penambangan pasir di Teluk Madura yang dikritisi oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) cabang Jawa Timur, Forum Masyarakat Pesisir Suramadu (FMPS) dan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara). Dalam artikel yang berjudul “Penambangan Pasir di Teluk Madura: Nelayan Protes, Perusahaan Berkeras,

Pemerintah?” yang diunggah dalam *website* resmi WALHI Jatim menuliskan ketidakberpihakan pemerintah dalam menjamin kehidupan nelayan di sekitar wilayah penambangan.<sup>1</sup> WALHI Jatim bersama FMPS mengeluarkan pernyataan sikap yang menolak rencana proyek penambangan atau pengerukan pasir di perairan Selat Madura. WALHI dan FMPS meminta Gubernur Jatim bertindak tegas dan mematuhi peraturan rencana tata ruang dan wilayah perairan selat Madura.

Penolakan yang gencar dilakukan oleh WALHI Jatim dan FMPS tidak memberikan dampak yang terasa karena penambangan masih saja beroperasi. Kemudian protes kembali datang dari Kiara pada awal Maret 2013. Lembaga ini mengecam aktivitas penambangan pasir oleh berbagai perusahaan yang mengancam ekosistem dan berdampak pada mata pencaharian nelayan tradisional. Kiara juga mengkritik Peraturan Presiden (Perpres) No. 122/2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil karena dinilai mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang praktik pengkaplingan atau privatisasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Koordinator Divisi Pendidikan dan Penguatan Jaringan Kiara, Selamet Daroyni mengatakan bahwa dengan Perpres ini, negara menyetujui praktik pengkaplingan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan menggusur masyarakat nelayan dari sumber-sumber kehidupannya. Terbitnya Perpres No 122/2012 menunjukkan pengabaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No 3/PUU-VIII/2010 yang mengamankan

---

<sup>1</sup> Penambangan Pasir di Teluk Madura: Nelayan Protes, Perusahaan Berkeras, Pemerintah? 2013. WALHI Jatim. [online]. Diakses pada 2 Mei 2015 (09.56). Tersedia pada: <http://walhijatim.or.id/2013/03/penambangan-pasir-di-teluk-madura-nelayan-protes-perusahaan-berkeras-pemerintah/>

adanya hak-hak konstitusional nelayan, termasuk nelayan tradisional yang harus dilindungi, dijamin, dan dipenuhi oleh negara.<sup>2</sup>

Pada gilirannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta bersikap tegas dan meninjau ulang rancangan Perpres tentang reklamasi untuk menghentikan tingginya tren reklamasi yang dilakukan dengan pengerukan pasir di wilayah pantai dan pesisir. Terlebih lagi berdasarkan pantauan Kiara dalam 10 tahun terakhir, reklamasi di wilayah pantai dan pesisir berlangsung secara masif dan tidak hanya terjadi di Pulau Jawa seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya, tetapi juga telah meluas hingga ke wilayah di luar Pulau Jawa, seperti proyek Padang Bay City di Sumatera Barat, reklamasi Teluk Lampung dan Teluk Balikpapan di Kalimantan Timur, reklamasi di Pantai Losari dan Pantai Buloa di Sulawesi Selatan, dan Pantai Kalasey dan Teluk Manado di Sulawesi Utara.<sup>3</sup> Dengan demikian *civil society* berusaha untuk memberikan masukan dan mengingatkan pemerintah agar tidak selalu mementingkan kepentingan modal semata tetapi perlunya melindungi dan menjamin masyarakat yang tinggal dan mencari nafkah di wilayah pantai dan pesisir.

Kecenderungan serupa juga terjadi di Bali dimana reklamasi dilakukan di Pulau Serangan pada masa orde baru dan kini muncul kembali rencana untuk mereklamasi Pulau Dewata di perairan Teluk Benoa. Reklamasi di Pulau

---

<sup>2</sup> B. Kunto Wibisono (ed.). 2013. Kiara Kecam Aktivitas Penambangan Pasir Selat Madura. [online]. Diakses pada 2 Mei 2015 (12.07). Tersedia pada: <http://www.antaranews.com/berita/360957/kiara-kecam-aktivitas-penambangan-pasir-selat-madura>

<sup>3</sup> Yulvianus Harjono. 2011. Presiden Didesak Hentikan Reklamasi Wilayah Pesisir. [online]. Diakses pada 3 Mei 2015 (17.54). Tersedia pada: <http://nasional.kompas.com/read/2011/12/02/20030566/Presiden.Didesak.Hentikan.Reklamasi.Wilayah.Pesisir>

Serangan dilakukan oleh Bali Turtle Island Development (BTID) karena ingin meningkatkan potensi pariwisata Pulau Serangan sebagai pulau penyu. Sedangkan rencana reklamasi di Teluk Benoa akan dikembangkan oleh PT. Tirta Wahana Bahari Internasional (TWBI) dengan alasan untuk menyelamatkan lingkungan perairan Teluk Benoa yang kritis akibat sampah dan pendangkalan.

Berdasarkan laporan studi lapangan dari Lisa Woinarski, sejak tahun 70-an industri pariwisata telah berkembang di Pulau Serangan dimana turis berkunjung ke pulau tersebut untuk melihat penyu. Namun, pada akhir tahun 80-an, industri pariwisata di Pulau Serangan direncanakan akan semakin berkembang ketika investor BTID berinvestasi membangun sejumlah akomodasi pariwisata di Pulau Serangan. Dikutip dari laporan Lembaga Penelitian Universitas Udayana, proyek yang direncanakan BTID adalah pembangunan lapangan golf, *resort*, *lagoon* untuk sarana rekreasi air, *yacht club*, *beach club house*, vila, marina/ferry dan jembatan penyeberangan dari daratan pulau Bali ke Pulau Serangan. Selain itu, agar proyek BTID lebih menarik perhatian masyarakat Bali dan Serangan, maka dibuat rencana untuk membangun pusat penelitian penyu dan bakau, kios dan restoran, serta perbaikan fasilitas pemukiman masyarakat seperti sarana air, listrik, toilet umum dan lain-lain. Proyek itu memanfaatkan seluruh lahan Pulau Serangan sekitar 112 ha untuk direklamasi sehingga luas lahan seluruhnya yang akan dikembangkan mencapai kurang lebih 491 ha atau hampir 4 kali lipat luas Pulau Serangan sebelumnya.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Lisa Woinarski. 2002. *Pulau Serangan: Dampak Pembangunan pada Lingkungan dan Masyarakat*. Laporan Studi Lapangan Universitas Muhammadiyah Malang bekerja sama dengan Australian Consortium For In-Country Indonesian Studies. hal. 1-2



Pada perkembangan selanjutnya, reklamasi yang dikerjakan pihak investor ternyata banyak melakukan pelanggaran dan menimbulkan permasalahan bagi masyarakat Serangan khususnya, baik dari segi lingkungan maupun ekonomi. Pelanggaran terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) menimbulkan permasalahan lingkungan, seperti perubahan arus laut yang pada gilirannya mempercepat abrasi pantai di wilayah Tanjung Benoa, kehilangan ekosistem penting (padang rumput laut, terumbu karang, hutan bakau, dan dataran pasang surut), dan kehilangan penyu sebagai ikon Pulau Serangan akibat reklamasi pantai.<sup>5</sup> Sedangkan kerugian ekonomi dilihat dari hilangnya sumber penghidupan dan pendapatan para nelayan di pantai timur dan utara Serangan akibat reklamasi. Terlebih lagi, 85% penduduk Pulau Serangan bekerja sebagai nelayan, termasuk nelayan pesisir dan nelayan laut lepas. Selain nelayan, para pedagang di Serangan juga mengalami kerugian dimana sebelum proyek reklamasi dimulai, mereka berjualan di taman penyu dan bisa mendapat kira-kira Rp50.000/hari. Namun, setelah proyek BTID dilakukan, lokasi taman wisata itu menjadi tanah proyek dan mereka diharuskan pindah ke lokasi pantai timur yang berjarak satu setengah jam jika ditempuh dengan berjalan kaki. Penderitaan ini juga dialami oleh 38 warga Serangan yang bekerja sebagai penambang perahu yang menyeberangkan turis dari daratan Bali ke Pulau Serangan harus kehilangan pekerjaan mereka setelah BTID membangun jalan penghubung. Menurut laporan

---

<sup>5</sup> *Ibid.* hal. 8-12

Woinarski kerugian yang diderita oleh masyarakat Serangan mencapai Rp8.829.250.000 per tahun.<sup>6</sup>

Laporan Woinarski yang perlu mendapat sorotan adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam proyek reklamasi BTID yang dilakukan oleh Panitia Pembebasan Tanah dan diikuti Kodam IX Udayana sebagai pelaksana tugas. Tanah dibebaskan dengan intimidasi dari Kodam dimana tanah masyarakat Serangan harus dibebaskan untuk ‘kepentingan negara’ yang sebenarnya tanah itu dimaksudkan untuk BTID.<sup>7</sup> Jika terdapat warga yang menolak menjual tanahnya dikarenakan tanah warisan keluarga, mereka akan mengalami teror dari Kodam, seperti dipenjarai selama sehari, diancam dengan pistol yang diarahkan ke dahi, dan dipukul. Oleh karena itu, tidak sedikit masyarakat Serangan yang mengungsi keluar kabupaten bersama keluarga karena takut didatangi militer. Karena tekanan dari Kodam ini, satu orang meninggal karena depresi mental. Kodam membenarkan intimidasinya dengan menuduh masyarakat sebagai anggota Partai Komunis Indonesia atau ‘penghambat pembangunan’, yang selama Orde Baru dipahami mirip pengkhianatan.<sup>8</sup>

Kerugian ini menjadi semakin besar ketika proyek reklamasi yang digarap oleh BTID terpaksa berhenti di tengah jalan karena kondisi politik serta kesulitan dana akibat krisis moneter pada tahun 1998 dimana proyek tersebut hanya berjalan kurang lebih 60% dari rencana awal.<sup>9</sup> Di samping itu, hingga kini

---

<sup>6</sup> *Ibid.* hal. 22-24

<sup>7</sup> Suluh Rakyat. 2000. Nasib Warga Serangan Makin Tak Jelas. Edisi 4. 20-27 Juli dalam *Ibid.* hal. 12

<sup>8</sup> *Ibid.* hal. 12-13

<sup>9</sup> PT. BTID. 1998. Rapat Pembahasan Pelaksanaan Amdal Pengembangan Pulau Serangan. 4 September Kantor Bappeda Kodya Denpasar, Bali dalam *Ibid.* hal. 10

investor lain tidak bersedia untuk melanjutkan proyek yang belum terselesaikan itu.

Dengan skenario seperti ini menjadikan *civil society* sulit bahkan tidak berkembang karena tidak dilibatkan dalam Amdal dan dialog terkait proyek reklamasi BTID. Konsultan Australia menegaskan bahwa proses Amdal tidak hanya prosedur dokumentasi proyek, tapi juga proses demokratis dimana masyarakat meninjau rencana dan menyetujui atau menolak rencana itu. Akan tetapi, dalam kasus Serangan kebanyakan masyarakat tidak mengetahui rencana BTID dan sama sekali tidak ada masukan dari masyarakat, baik ke pemerintah maupun ke pihak investor.<sup>10</sup> Masyarakat baru mengetahui adanya proyek selama tahap pembebasan tanah yang pada gilirannya menyebabkan pelanggaran HAM seperti yang telah dipaparkan sebelumnya.

Selang empat belas tahun kemudian, masyarakat di pesisir Pulau Bali kembali dihadapkan pada rencana reklamasi yang kini mengambil lokasi di Teluk Benoa. Mengingat pengalaman reklamasi di Pulau Serangan sebelumnya dimana *civil society* setempat dimandulkan oleh pemerintah melalui intimidasi militer, kini *civil society* di Teluk Benoa akan menjawab tantangan baru dalam kebebasan mengutarakan pendapat dan pendewasaan *civil society* pasca kejatuhan orde baru yang represif.

*Civil society* dalam rencana reklamasi Teluk Benoa telah diteliti sebelumnya oleh Suantika dalam tesisnya yang berjudul Resistensi Masyarakat Lokal Terhadap Kapitalisme Global. Akan tetapi, dalam penelitian tersebut

---

<sup>10</sup> *Ibid.* hal. 3

Suantika memfokuskan diri hanya pada resistensi masyarakat lokal yang tergabung dalam Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBALI) dalam menolak rencana reklamasi di Teluk Benoa. Adapun hasil yang didapat lebih ke arah pembedahan ForBALI mulai dari latar belakang terbentuknya organisasi ini, alasan penolakan, bentuk perlawanan, dan dinamika ForBALI dalam menentang rencana reklamasi.<sup>11</sup> Lebih jauh lagi, rencana reklamasi di Teluk Benoa digambarkan Suantika sebagai suatu bentuk kapitalisme global yang akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat lokal.

Hasil temuan dalam tesis tersebut diawali dengan alasan mengapa reklamasi ditolak, yaitu karena berbenturan dengan faktor agama, adat, dan budaya.<sup>12</sup> Faktor ini lebih banyak dijelaskan oleh Suantika terkait konsep *Tri Hita Karana* sebagai filosofi pembangunan di Bali yang mengandung tiga nilai: (1) *Parahyangan*, hubungan manusia dengan Tuhan, (2) *Palemahan*, hubungan manusia dengan lingkungan, dan (3) *Pawongan* yang menekankan hubungan sesama manusia. Suantika menemukan bahwa Pura Karang Tengah sebagai tempat peribadatan umat Hindu yang terletak di tengah laut dan hanya dapat dikunjungi pada saat air laut surut. Pura ini menurut rencana akan direklamasi sehingga nantinya akan berdiri di atas tanah reklamasi. Alasan yang didasari oleh *parahyangan* inilah yang menjadi salah satu dasar penolakan masyarakat Bali karena dengan dilakukannya reklamasi akan menghilangkan makna dari Pura tersebut sebagai penghormatan atas laut. Jika dikaitkan dengan *palemahan*,

---

<sup>11</sup> Wayan Suantika. 2014. Resistensi Masyarakat Lokal Terhadap Kapitalisme Global: Studi Kasus Reklamasi Teluk Benoa Bali Tahun 2012-2013. *Tesis*. Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga

<sup>12</sup> *Ibid.* hal. 63-77



reklamasi diduga akan mengubah arus air laut yang pada gilirannya akan menyebabkan banjir bagi kawasan di sekitar Teluk Benoa. *Mangrove* sebagai pelindung dari abrasi pun ditakutkan akan rusak jika reklamasi benar-benar direalisasikan. Kemudian alasan yang berhubungan dengan *palemahan*, ForBALI meyakini dalam penjelasan Suantika bahwa budaya *menyama braya* (persaudaraan) masyarakat Bali akan tergerus dikarenakan oleh budaya konsumerisme dan materialisme yang dibawa oleh kapitalisme. *Menyama braya* dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari masyarakat Bali dimana intensnya interaksi sesama masyarakat yang difasilitasi oleh banjar (ruang publik di Bali). Akibat dari budaya materialisme khususnya, dikhawatirkan nantinya masyarakat Bali yang terserap di dalam lapangan pekerjaan yang akan tersedia di Teluk Benoa akan disibukkan oleh pekerjaan mereka masing-masing karena prinsip dari kapitalisme adalah eksploitasi.

Selain terbentur dengan faktor agama, adat, dan budaya, reklamasi mengalami penolakan juga disebabkan oleh landasan hukum yang cacat dan pertimbangan ketimpangan pembangunan di Bali. Dilihat dari SK Gubernur bernomor 2138/02-C/HK/2012 tentang izin hak pemanfaatan dan pengembangan Teluk Benoa kepada PT. Tirta Wahana Bahari Internasional (TWBI), dinilai bertentangan dengan Perpres No. 45 tahun 2011 yang intinya menyebutkan bahwa daerah Teluk Benoa sebagai daerah konservasi yang tidak boleh dimanfaatkan. Selain itu dengan adanya rencana reklamasi ini, ketimpangan pembangunan di Bali juga diangkat sebagai alasan penolakan karena ketidakmerataan pembangunan di bagian utara dan selatan Bali akan menimbulkan beban yang

besar di kawasan Bali selatan padahal Bali bagian selatan sudah sangat padat dengan penduduk dan obyek wisata.<sup>13</sup>

Pada bab berikutnya, Suantika melanjutkan penelitiannya dengan menyoroti ForBALI sebagai aliansi masyarakat lintas sektoral yang dengan konsisten menentang rencana reklamasi Teluk Benoa.<sup>14</sup> Pada awal bab, dijelaskan bagaimana ForBALI lahir dari berbagai elemen masyarakat yang peduli terhadap Bali mulai dari mahasiswa, seniman, pemusik, tokoh masyarakat, hingga pemuka agama. Dalam memperjuangkan aspirasinya, Suantika mengelompokkan bentuk perlawanan ForBALI ke dalam dua bentuk, yaitu perlawanan *niskala* (batiniah) dan *sekala* (lahiriah). Perlawanan dalam bentuk *niskala* banyak dilakukan oleh pemuka agama di Bali, khususnya Hindu dengan melakukan ritual di pesisir Teluk Benoa. Ritual ini diperuntukkan agar menjauhkan Bali dari segala musibah dan dampak buruk dari pembangunan. Di lain pihak, perlawanan *sekala* diwujudkan ke dalam bentuk protes kepada pemerintah. Suantika menunjukkan perlawanan *sekala* yang telah dilakukan ForBALI antara lain: (1) demonstrasi dengan maksud menuntut pemerintah Bali untuk mencabut SK gubernur bernomor 2138/02-C/HK/2012 tentang izin hak pemanfaatan dan pengembangan Teluk Benoa kepada PT. TWBI; (2) diplomasi yang dilakukan akademisi dan tokoh masyarakat dengan pemerintah khususnya ketika gubernur Bali membuka ruang dialog pada 3 Agustus 2013; (3) menggalang petisi secara *online* yang dapat diakses pada [change.org](http://change.org); dan (4) kampanye kreatif yang melibatkan unsur seni dan musik.

---

<sup>13</sup> *Ibid.* hal. 77-80

<sup>14</sup> *Ibid.* hal. 87

Salah satu bentuk protes ini disalurkan dalam lagu yang diberi judul Mars Bali Tolak Reklamasi.<sup>15</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam skripsi ini memiliki fokus penelitian yang berbeda dibandingkan dengan tesis yang disusun oleh Suantika. Jika Suantika mendalami gerakan *civil society* yang menentang rencana reklamasi Teluk Benoa –yang dalam hal ini ForBALI, penelitian yang dilakukan peneliti lebih diarahkan kepada dinamika *civil society* termasuk masyarakat yang mendukung dalam mempengaruhi rencana reklamasi Teluk Benoa dan isu-isu yang diangkat oleh *civil society* yang berkontestasi. Selain fokus penelitian yang berbeda, teori yang dipakai dalam menganalisis *civil society* di Bali yang terkait dalam rencana reklamasi teluk Benoa tidak menggunakan teori yang sama. Suantika dalam tesisnya menggunakan pendekatan kritis yang dihubungkan dengan kapitalisme global. Di lain pihak, peneliti menggunakan teori *civil society* sebagai alat analisis dalam menjelaskan dinamika pro dan kontra masyarakat Bali terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa.

Dengan demikian, penelitian ini berusaha untuk melengkapi hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Wayan Suantika dengan menambahkan organisasi *civil society* yang mendukung rencana reklamasi sehingga pada gilirannya akan terlihat dinamika pro-kontra di antara *civil society* dalam menanggapi rencana reklamasi Teluk Benoa. Penelitian ini juga menjelaskan isu-isu yang menjadi dasar perjuangan organisasi *civil society* beserta cara-cara yang ditempuh oleh mereka dalam memperjuangkan kepentingannya. Oleh karena itu,

---

<sup>15</sup> *Ibid.* hal. 89-101

hasil penelitian ini sebagai kelanjutan dari penelitian yang dilakukan Suantika dengan fokus yang juga melibatkan pendukung rencana reklamasi melalui analisis yang menggunakan teori *civil society* dengan pendekatan pluralis.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Isu-isu apa yang diangkat dalam perjuangan *civil society* di Bali terkait rencana reklamasi Teluk Benoa?
2. Bagaimana *civil society* memperjuangkan kepentingannya dalam mendukung maupun menolak rencana reklamasi Teluk Benoa?
3. Bagaimana dinamika kelompok pendukung dan penentang rencana reklamasi Teluk Benoa dalam memperjuangkan kepentingannya?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi isu-isu yang diangkat sebagai perjuangan *civil society* dalam rencana reklamasi Teluk Benoa.
2. Mengetahui cara-cara yang ditempuh oleh *civil society* dalam rencana reklamasi Teluk Benoa untuk meyakinkan masyarakat umum dan pemerintah.
3. Menjelaskan dinamika yang terjadi antara pihak pendukung dan penentang rencana reklamasi Teluk Benoa dalam kontestasi politik yang pada gilirannya akan mampu mempengaruhi keputusan pemerintah.



## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan keilmuan, khususnya bagi ilmu politik yang berkaitan dengan *civil society* dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah. Terlebih lagi, penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai dinamika yang terjadi ketika *civil society* mengalami polaritas dalam menyikapi kebijakan pemerintah.

## 1.5 Kerangka Teori

### 1.5.1 Teori *Civil society*

Konsep mengenai *civil society* sebenarnya merupakan konsep yang agak ambigu dan akan bermakna berbeda ketika dipahami oleh orang yang berbeda pula. *Civil society* sebagaimana yang didefinisikan oleh Larry Diamond merupakan kondisi kehidupan sosial yang terorganisir yang bersifat terbuka, sukarela, mandiri, terbebas dari negara, dan diikat oleh hukum atau konsensus. *Civil society* berbeda dengan “*society*” secara umum karena melibatkan masyarakat dengan aksi kolektif dalam ruang publik untuk mengekspresikan kepentingan, preferensi, dan ide guna mencapai tujuan kolektif serta menuntut negara untuk meningkatkan struktur dan fungsi

negara yang pada gilirannya menjadikan aparatur negara lebih akuntabel.<sup>16</sup> Memang pada dasarnya semua masyarakat merupakan bagian dari *civil society* yang berhubungan satu sama lain di dalam sebuah komunitas melalui jaringan nilai dan institusi. Kualitas partisipasi mereka dalam lingkup publik dan privat merupakan tindakan yang menentukan derajat *civil society* yang ada dalam masyarakat.<sup>17</sup> Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat partisipasi mereka dalam peran *civil society* sebagai *intermediary*, berbanding lurus dengan tingkat kualitas mereka sebagai *civil society*.

Diamond menjelaskan bahwa *civil society* sebagai *intermediary* yang berperan sebagai perantara antara negara dan sektor privat sehingga individu dan keluarga, *inward-looking group* seperti organisasi keagamaan, dan kelompok yang berorientasi pada profit atau perusahaan tidak dapat dikategorikan sebagai *civil society*. Hal ini dikarenakan kelompok tersebut berdimensi “masyarakat parokial” yang tidak memiliki perhatian terhadap kehidupan sipil dan permasalahan publik. Akan tetapi, mereka mungkin saja dapat membantu menumbuhkan kultur dan pola keterlibatan di dalam lingkup publik yang menengahi negara dan privat. Sievers menambahkan bahwa sebagai *intermediary*, *civil society* tidak hanya berperan dalam menengahi

<sup>16</sup> Larry Diamond. 1997. *Civil society and the Development of Democracy*". Estudio/Working Paper 1997/101, Center for Advanced Studies in the Social Sciences, Juan March Institute, Madrid, Spain. hal. 6

<sup>17</sup> Bruce Sievers. 2009. *What is Civil society?* GIA Reader 20(1). <http://www.giarts.org/article/what-civil-society>. 16 Juni 2015 (15.13). Artikel ini merupakan ringkasan dari dua chapter pertama dalam buku *Civil society, Philanthropy and the Fate of the Commons*, yaitu *The Concept of Civil society and Institutional Structures*. Buku ini ditulis oleh Bruce Sievers dan dipublikasikan oleh University Press of England.

negara dan sektor privat, tetapi juga jaringan LSM lokal, nasional, maupun internasional, dan hubungan sosial yang saling menghargai.<sup>18</sup>

*Civil society* juga dibedakan dari masyarakat politik yang meliputi partai politik dan organisasi-organisasi yang berkontribusi dalam kampanye dimana tujuan utama mereka adalah memperebutkan kontrol atas negara atau setidaknya memperoleh kursi di dalam pemerintahan. Kemudian Diamond membenarkan bahwa *civil society* dapat beraliansi dengan partai politik. Akan tetapi, jika *civil society* terperangkap di dalam ambisi partai politik, maka *civil society* akan kehilangan inti dari aktivitas mereka dan kemampuan *intermediary* serta fungsi pembangunan demokrasi yang pada gilirannya *civil society* akan beralih menjadi masyarakat politik.<sup>19</sup>

*Civil society* tidak hanya memiliki peran untuk membatasi kekuasaan negara, tetapi juga melegitimasi kewenangan negara ketika otoritas negara memang berdasarkan hukum yang berlaku. Akan tetapi, ketika negara lemah secara hukum keberadaan *civil society* masih bisa bertahan hanya jika elemen-elemen di dalamnya memiliki *shared rules* yang berupa nir kekerasan ataupun penghargaan terhadap pluralisme. Kondisi berdimensi “*civil*” seperti inilah yang tidak dapat dipisahkan dari *civil society*.<sup>20</sup>

Kekeliruan yang paling sering terjadi ketika menganggap bahwa *civil society* hanya merupakan sebuah organisasi yang independen dari negara padahal dalam mengonseptualisasikan *civil society* tidaklah dapat sesederhana

---

<sup>18</sup> Sievers. *Loc. Cit.*

<sup>19</sup> Diamond. *Loc. Cit.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

itu. Oleh karena itu, setidaknya terdapat empat karakteristik yang mampu membedakan organisasi *civil society* dengan kelompok dalam masyarakat.

Pertama, yang menjadi perhatian utama *civil society* adalah lebih pada permasalahan publik daripada sektor privat yang pada gilirannya dapat membedakannya dengan masyarakat parokial sehingga *civil society* dapat diakses secara inklusif dan terbuka oleh siapa saja. Oleh karena itu yang menjadi tujuan utama dari *civil society* adalah pencapaian tujuan komunal. Walzer melihat tujuan *civil society* ini dikhususkan demi mencari solusi sebuah permasalahan publik.<sup>21</sup>

Kedua, *civil society* tetap berhubungan dengan negara dalam beberapa hal namun tidak bermaksud untuk memenangkan kontrol atas negara maupun memperoleh posisi di dalam negara. Melainkan, para aktor *civil society* berusaha untuk mempengaruhi negara dalam perubahan kebijakan, reformasi institusi, bantuan, ganti rugi, keadilan, dan pengawasan terhadap akuntabilitas negara. Organisasi dan gerakan yang menuntut para elit yang berkuasa agar mundur dari jabatannya ataupun berupaya untuk mengganti keadaan negara masih merupakan bagian dari *civil society* jika tujuan mereka hanyalah untuk mereformasi struktur kekuasaan bukan berusaha untuk mengambil alih kekuasaan negara.

Ketiga, *civil society* juga meliputi aspek pluralisme dan keberagaman sehingga fundamentalis agama, chauvinis etnis, dan gerakan revolusioner yang memonopoli ruang politik dalam masyarakat dengan menyingkirkan

---

<sup>21</sup> Walzer. 1982 dalam Sievers. *Loc. Cit.*



semua saingan mereka dan mengklaim bahwa hanya diri merekalah yang merepresentasikan satu-satunya jalan tidak dapat dikatakan sebagai *civil society*. Dengan demikian, *civil society* mewarisi kultur demokrasi yang memiliki toleransi tinggi, moderasi, kemauan berkompromi, dan menghargai pandangan yang berseberangan dengan nilai dan norma yang mengarahkan *civil society* kepada praktik advokasi politik dan kontestasi yang stabil. Pada perkembangan selanjutnya, dinamika yang terjadi dalam *civil society* untuk mencapai konsensus melalui perdebatan dapat terwujud dan dengan cara-cara dimana anggota *civil society* dapat bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan publik.<sup>22</sup>

Keempat terkait dengan parsialitas bahwa tidak terdapat satu kelompok pun dalam *civil society* yang mewakili keseluruhan kepentingan komunitas. Kelompok yang berbeda merepresentasikan atau mencakup kepentingan yang berbeda pula. Dengan demikian, *civil society* bukanlah suatu organisasi yang berusaha untuk merangkul semua anggotanya dengan keadaan yang totalitas yang mengisolasi diri mereka terhadap pandangan alternatif, menanamkan kekakuan, dan kepatuhan total.<sup>23</sup>

Selain keempat karakteristik *civil society* di atas, Sievers menekankan kembali penjelasan Diamond sebagaimana disebutkan bahwa *civil society* sebagai organisasi non-profit dan bersifat sukarela yang memainkan peran vital dalam pencapaian tujuan sosial.<sup>24</sup> Dengan demikian, karakteristik *civil*

---

<sup>22</sup> María Rosa de Martini dan Sofía de Pinedo. 1992 dalam *Ibid.* hal. 42

<sup>23</sup> *Ibid.* hal. 8-9

<sup>24</sup> Sievers. *Loc. Cit.*

*society* juga mencakup kesukarelaan anggotanya menjadi bagian dari organisasi *civil society* yang tidak berorientasi mencari keuntungan.

Pemahaman mengenai *civil society* sering kali mengalami suatu kebingungan mengenai batas-batas konsep ini. Ketidakjelasan ini dapat lebih dimengerti dengan memerhatikan perubahan tujuan dari organisasi atau kelompok. Organisasi keagamaan misalnya, yang pada umumnya memiliki fungsi dalam pemenuhan kebutuhan spiritual para anggotanya dalam masyarakat parokial. Namun ketika organisasi ini terlibat dalam perjuangan mengentaskan kemiskinan, kriminalitas, dan narkoba serta turut serta dalam melobi pemerintah dalam perumusan kebijakan publik mengenai aborsi, seksualitas, HAM, perlakuan hukum terhadap agama, dan isu-isu lainnya, maka organisasi keagamaan ini bertindak sebagai *civil society*. Sering kali suatu organisasi dengan aktivitas tertentu melewati batasan mereka untuk sementara waktu demi memperjuangkan permasalahan publik dan tergabung dalam gerakan yang lebih luas.<sup>25</sup> Pada gilirannya, kelompok-kelompok dengan latar belakang dan perhatian yang berbeda ini ketika memperjuangkan isu yang sama (publik) akan cenderung bersatu menjadi organisasi tunggal sebagaimana yang disebut oleh Schmitter sebagai “*strategic capacity*” untuk mendefinisikan aksi independen yang beranggotakan berbagai preferensi dan “*encompassing scope*” yang menjadi tempat representasi berbagai

---

<sup>25</sup> Diamond. *Loc.Cit.* hal. 9-10

kepentingan. Schmitter percaya dengan bersatunya berbagai kelompok akan menjadikan mereka lebih kuat.<sup>26</sup>

Diamond kemudian mencoba melihat *civil society* di dalam negara demokrasi dimana agenda mereka yang lebih menonjol terlihat pada fungsi pengawasan dan pembatasan kekuasaan negara termasuk pemantauan kinerja badan pemerintahan, para menteri, dan DPR secara individu untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan kewenangan.<sup>27</sup> Sehingga di dalam negara demokrasi media massa memainkan peran yang sangat vital. Investigasi dan pembongkaran yang dilakukan oleh media massa mampu memfasilitasi *civil society* yang pada gilirannya mendorong *civil society* menuju pergerakan. Terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh media massa untuk membantu *civil society* dalam menjalankan agendanya, yaitu media massa secara finansial harus otonom dan tidak terikat secara politik. Diamond kemudian memaparkan studi di Korea Selatan yang menunjukkan bahwa pertumbuhan media massa yang bebas dan tegas mampu membongkar korupsi di dalam tubuh pemerintah dan secara signifikan menurunkan toleransi publik akan hal itu.<sup>28</sup>

Selain pengawasan dan pembatasan kewenangan negara, *civil society* juga berperan dalam pengembangan demokrasi. *Civil society* sebagai suplemen peran partai politik dalam merangsang partisipasi politik,

---

<sup>26</sup> Philippe Schmitter. 1997 dalam *Ibid.* hal. 23

<sup>27</sup> *Ibid.* hal. 36

<sup>28</sup> *Ibid.* hal. 37

meningkatkan keberhasilan politik dan kemampuan masyarakat demokratis, dan mempromosikan kewajiban sekaligus hak warga negara.<sup>29</sup>

Sebuah *civil society* yang telah matang dan kuat secara luas menyebarkan informasi dan memperkuat masyarakat dalam aksi kolektif untuk mempertahankan nilai dan kepentingan mereka. Kelompok *civil society* kadang mampu memenangkan kekuatan politik melalui demonstrasi misalnya dimana kemenangan atas kontestasi mempengaruhi pemerintah dalam pembuatan kebijakan tidak dapat lepas dari penyebaran informasi yang baik di antara anggotanya. Media massa yang otonom dan pluralis merupakan satu-satunya cara untuk menyediakan informasi kepada publik melalui berita dan berbagai perspektif. Organisasi independen dapat pula menyediakan informasi bagi masyarakat mengenai aktivitas pemerintah namun tidak berdasarkan apa yang dikatakan pemerintah melainkan berdasarkan investigasi secara mandiri. Oleh karena itu, mobilisasi dengan penggunaan informasi terkini ditambah dengan pemahaman yang menyeluruh terhadap permasalahan yang diperjuangkan merupakan syarat yang esensial bagi *civil society* dalam pencapaian tujuannya.<sup>30</sup>

Terdapat perbedaan perilaku *civil society* di negara yang masih berkembang dengan negara maju. Jonathan Fox menerangkan bahwa di negara berkembang atau negara yang sedang berada dalam transisi menuju demokrasi perjuangan *civil society* cenderung kasar dan mengarah pada konflik kekerasan seperti yang ditunjukkan India dan Brazil oleh Diamond

---

<sup>29</sup> *Ibid.* hal. 41

<sup>30</sup> *Ibid.* hal. 50-51



dimana konflik secara intensif terjadi dan pelanggaran HAM meningkat ketika *civil society* (*newly conscious groups*) menegaskan aksi mereka.<sup>31</sup> Negara masih menekan *civil society* yang pada prosesnya berakibat pada hubungan yang konfliktual antara negara dan *civil society* hingga berkembang menjadi tindakan-tindakan yang represif dari negara. Dapat dipahami pula dalam keadaan demikian, *civil society* memiliki kemungkinan untuk berkonflik sesama *civil society* dengan pandangan yang berbeda khususnya bagi mereka yang mendukung agenda pemerintah dengan mereka yang menentangnya. Kemudian pada negara maju dengan perekonomian yang mapan dimana *civil society* lebih pluralis, cenderung memperjuangkan kepentingan yang luas dan kelompok-kelompok kepentingan mampu melakukan lintas batas untuk memperjuangkan isu publik yang sama. Ketika polaritas terjadi, perilaku lintas batas ini akan mampu untuk mengurangi perilaku militan yang ekspansif dan dapat mendorong toleransi akan perbedaan pendapat yang pada gilirannya akan menumbuhkan kompromi-kompromi di antara mereka.<sup>32</sup> Dengan demikian sekalipun terjadi pandangan yang berbeda dengan negara ataupun di antara *civil society* itu sendiri, dialog akan tercipta untuk menemukan solusi yang sifatnya *win-win solution*.

Pertumbuhan *civil society* pada gilirannya akan menawarkan pelayanan dan pengembangan teknik mediasi untuk meringankan konflik melalui proses tawar-menawar dan akomodasi. *Civil society* kemudian membangun kepercayaan terhadap integritas dan kredibilitas mereka kepada

---

<sup>31</sup> Jonathan Fox. 1994 dalam *Ibid.* hal. 45

<sup>32</sup> Lipset. t.t dalam *Ibid.* hal. 47

pihak yang berkonflik dengan meyakinkan bahwa diri mereka netral secara politik. Kasus yang terjadi di Republik Afrika Tengah dimana Ligue Centrafricaine des Droits de l'Homme sebagai organisasi *civil society* yang mampu memainkan peran mediasi krusial selama pergolakan militer pada tahun 1996. *Civil society* ini berhasil menengahi militer dan pemerintah dan sukses membujuk para tentara untuk menurunkan senjata mereka.<sup>33</sup>

Dalam beberapa kasus dilema yang harus dihadapi dalam mendukung peran *civil society* adalah kapasitasnya yang mungkin berlebihan dimana karakter *civil society* menjadi hiperaktif, konflikual, dan tuntutan yang tanpa henti dapat melemahkan negara dengan penetrasi berbagai dan besarnya permintaan sehingga membebani negara. Di samping itu, *civil society* akan melupakan dirinya dengan meninggalkan perhatian mengenai kesejahteraan masyarakat dan permasalahan publik yang sebenarnya. Akibatnya, negara sendiri harus memiliki otonomi yang cukup, legitimasi, kapasitas dan dukungan untuk mengagregasi berbagai kepentingan dan tuntutan serta mampu mengimplementasikan kebijakan dan mengalokasi sumber daya untuk mampu menyeimbangkan kelompok-kelompok yang berkompetisi. Akan tetapi, penguatan negara dalam menanggapi *civil society* yang plural harus dilakukan secara hati-hati agar tidak terjebak dalam korporatisme dimana negara dapat mengontrol *civil society* dan juga media massa dengan lebih memilih cara kooptasi, represi, ataupun dominasi dibandingkan dengan melakukan proses tawar-menawar dengan *civil society* seperti yang pernah

---

<sup>33</sup> David Peterson. 1996 dalam *Ibid.* hal. 53

terjadi di Meksiko, Mesir, dan Indonesia pada orde baru.<sup>34</sup> Dilema seperti ini biasanya terjadi pada negara-negara demokrasi baru dimana negara menyalurkan banyak energi dalam program-program ekonomi dengan dukungan serikat dagang, pensiunan, dan borjuis yang dilindungi negara. Oleh karena itu, *civil society* sebagai kekuatan penyeimbang harus terdidik dan termobilisasi.<sup>35</sup>

Di negara-negara demokrasi yang masih muda dan terlahir dari totalitarian yang panjang dengan tindakan represif yang tinggi dan juga penyalahgunaan peraturan, terdapat permasalahan yang lebih dalam. Geremek mengamati bahwa dengan keadaan yang dijelaskan sebelumnya menjadikan *civil society* sebagai oposisi pemerintah.<sup>36</sup> Warisan ini seperti yang banyak terjadi di Afrika dimana Célestin Monga menyebutnya sebagai “*civic deficit*”.<sup>37</sup> Dalam memahami *civic deficit*, *civil society* harus dilihat sebagai organisasi yang independen, namun tidak teralienasi dari negara. *Civil society* tidak hanya memberikan pengawasan dan pembatasan terhadap negara, tetapi juga tetap memberi penghargaan terhadap otoritas negara. Di samping itu, gambaran mengenai *civil society* yang terhormat, waspada, dan terorganisir yang selalu memeriksa kredibilitas negara dimana negara selalu dianggap melakukan perampasan dan korupsi merupakan sebuah romantisme yang kuat

---

<sup>34</sup> Philippe C. Schmitter. 1984 dalam *Ibid.* hal. 56

<sup>35</sup> *Ibid.* hal. 56-57

<sup>36</sup> Bronislaw Geremek. 1992 dalam *Ibid.* hal. 57

<sup>37</sup> Célestin Monga. 1995 dalam *Ibid.*

dan dapat menyebabkan kekeliruan peran *civil society* dalam mengonstruksi demokrasi yang mampu bertahan lama.<sup>38</sup>

Perjuangan *civil society* akan lebih baik jika didukung oleh pendanaan yang cukup. Ketika anggota turut mendanai sebuah organisasi *civil society* secara sukarela, mereka akan merasa menjadi bagian dalam identitas organisasi sekaligus mempunyai rasa kepemilikan terhadap organisasi yang bersangkutan. Kemudian, dukungan finansial akan semakin kuat jika seluruh anggota organisasi turut memberikan sumbangan, terlebih lagi jika ditambah dengan hasil donasi para anggota dari organisasi-organisasi *civil society* lain yang memiliki visi yang sama. Pada gilirannya, organisasi *civil society* semacam ini akan menghasilkan anggota yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap identitasnya sebagai *civil society*. Itulah mengapa kampanye atau perekrutan anggota yang masif merupakan strategi yang efektif dalam mengembangkan organisasi *civil society*. Ironisnya, kenyataan ini hanya berlaku pada anggota-anggota yang mampu memberikan sumbangan dalam jumlah kecil seperti kasus organisasi HAM di Zimbabwe yang bernama Zimrights dimana ribuan anggotanya memberikan donasi hanya dalam jumlah kecil, namun organisasi ini mampu menumbuhkan komitmen para pendukungnya secara luas dalam skala nasional. Selanjutnya, komitmen tinggi yang telah terbentuk pada gilirannya akan menciptakan nilai-nilai kerjasama, kepercayaan, timbal balik, dan semangat memperjuangkan permasalahan publik. Dengan demikian, strategi ini mampu meningkatkan

---

<sup>38</sup> *Ibid.* hal. 59

finansial sekaligus menumbuhkan modal sosial anggotanya. Sebaliknya, jika terdapat donor yang turut membiayai sebuah organisasi *civil society* dalam jumlah besar akan mengakibatkan *civil society* menjadi terikat. Diamond memberi contoh *civil society* di Cili dan Argentina dimana *civil society* terlalu lemah untuk menyokong pendanaan secara mandiri melalui para pendukungnya. Negara pun memiliki krisis dalam modal sosial sehingga pada gilirannya *civil society* terpaksa untuk menerima bantuan dari sektor swasta di negara mereka padahal *civil society* di negara ini merepresentasikan perempuan, pemuda, pekerja informal, masyarakat kurang mampu, dan etnis minoritas. Akibatnya, mereka mengalami kesulitan dalam memperjuangkan suara mereka ketika membahas isu-isu yang sensitif yang merugikan pihak swasta. Diamond juga mempermasalahkan ketergantungan yang akan dialami *civil society* jika mereka menerima bantuan finansial yang masif dari organisasi internasional sebagaimana yang terjadi di Afrika Selatan.<sup>39</sup> Oleh karenanya, *civil society* diharapkan mampu membiayai organisasi mereka sendiri secara swadaya agar tetap independen dan mampu menjadi perantara dalam memediasi negara dan sektor privat guna memperjuangkan kepentingan publik.

---

<sup>39</sup> *Ibid.* hal.65-68



## 1.6 Kerangka Konseptual

### 1.6.1 *Civil society Organization*

Penguatan *civil society* khususnya di negara berkembang bermula bertujuan untuk menciptakan good governance. Pada perkembangan berikutnya, dukungan terhadap *civil society* memiliki motif untuk menjadikan *civil society* yang kuat yang mampu menuntut negara agar lebih demokratis dan transparan.<sup>40</sup>

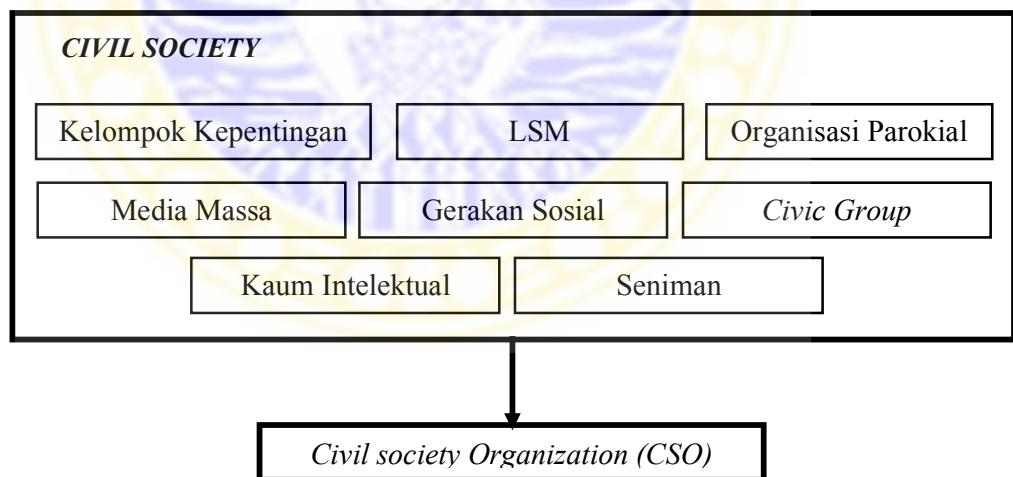
Penggunaan istilah *Civil society Organization (CSO)* dimaksudkan untuk penggunaan yang lebih luas dimana di dalamnya mencakup organisasi-organisasi di luar negara dan yang beroperasi dalam aktivitas non-profit. Dalam pengertian ini *CSO* juga meliputi lembaga swadaya masyarakat yang terlibat dalam aktivitas-aktivitas pembangunan.<sup>41</sup> Lebih jauh, Larry Diamond menjelaskan bahwa *CSO* kemudian juga meliputi cakupan organisasi yang lebih luas, yaitu: (1) Dalam bidang ekonomi (asosiasi produksi dan komersial); (2) budaya (organisasi agama, etnis, maupun komunal yang memperjuangkan hak kolektif, nilai-nilai, kepercayaan, keyakinan, dan simbol); (3) pendidikan dan informasi yang menyebarkan informasi publik, ide, dan berita; (4) kelompok kepentingan yang memperjuangkan kepentingan tertentu, seperti asosiasi veteran dan pensiunan serta kelompok profesional; (5) organisasi pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur, institusi, dan kualitas hidup

---

<sup>40</sup> Andrew Clayton, et al. 2000. *Civil society Organizations and Service Provision* dalam *Civil society and Social Movements Programme Paper Number 2*. United Nations Research Institute for Social Development. hal. 3

<sup>41</sup> *Ibid.* hal. 1-2

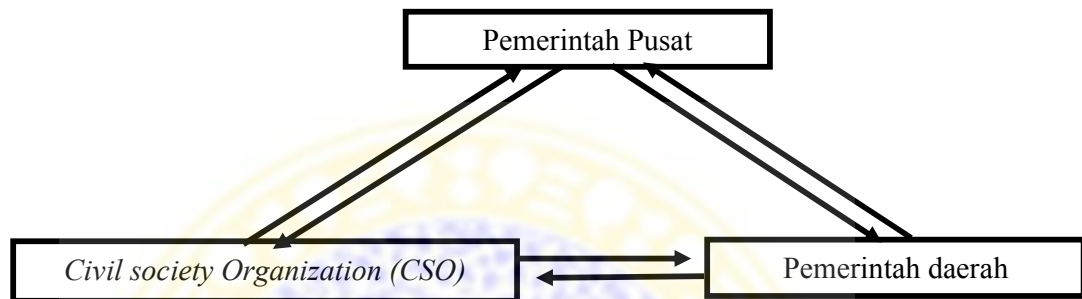
masyarakat; (6) gerakan yang berorientasi pada isu tertentu yang dapat diambil contoh, seperti isu lingkungan, perlindungan konsumen, hak perempuan, etnis minoritas, masyarakat berkemampuan khusus, dan korban diskriminasi; dan (7) *civic group* (pen: kelompok kewarganegaraan) yang menginginkan peningkatan sistem politik yang lebih demokratis dengan lebih memerhatikan perlindungan terhadap HAM, pendidikan pemilih dalam pemilu, pengawasan pemilu, dan pengungkapan praktik korupsi. Sebagai tambahan, *civil society* juga memiliki peran dalam mengevaluasi dan mengkritik negara sehingga media massa yang independen dan lingkup yang lebih luas dalam kultur dan aktivitas intelektual seperti universitas, *think tank*, penerbit buku, teater, pembuat film, dan seniman juga masuk dalam kategori *civil society*.<sup>42</sup>



Skema 1.1 Keanggotaan *Civil society Organization (CSO)*

<sup>42</sup> Diamond. *Loc.Cit.* hal. 7-8

Dalam hubungannya dengan negara, Robinson dan White berargumen bahwa hubungan *CSO* dan negara tidak semata bersifat komplementer, melainkan juga adanya suatu sinergi antara negara dan *CSO* yang meningkatkan keefektifan hubungan kerja di antara mereka.



Skema 1.2 Hubungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan *CSO*

Kunci dari hubungan ini terletak pada peran dan tanggung jawab kedua belah pihak dalam pelayanan yang lebih baik untuk kepentingan publik. Negara membutuhkan kerangka kebijakan yang tepat, sedangkan *CSO* mampu menyediakan kreatifitas, inovasi, dan jaringan komunitas yang kuat sehingga *CSO* dapat dikatakan sebagai katalis dalam meningkatkan kebijakan demi kepentingan publik.<sup>43</sup>

Tantangan paling berat dalam hubungan negara dan *CSO* terletak pada relasi tiga arah di antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan *civil society*. Tendler kemudian berasumsi bahwa *civil society* yang kuat merupakan prasyarat yang harus dipenuhi untuk menciptakan pemerintahan

<sup>43</sup> Robinson dan White. 1997 dalam Andrew Clayton, Peter Oakley, dan Jon Taylor. *Loc.Cit.* hal. 11

yang baik. Pemerintah pusat memainkan peran kuncinya dalam membangun kapasitas *civil society* untuk menuntut pemerintah daerah yang lebih baik. Oleh karena itu, Tendler menyimpulkan bahwa peningkatan pelayanan pemerintah lokal tergantung juga pada pemerintah pusat yang tidak hanya mengandalkan *civil society*.<sup>44</sup>

## 1.7 Metode Penelitian

### 1.7.1 Fokus Penelitian

*Civil society* menjadi fokus dalam penelitian ini dimana peneliti berusaha untuk menggambarkan isu-isu yang diperjuangkan oleh organisasi *civil society* di dalam rencana reklamasi Teluk Benoa dan juga strategi yang digunakan untuk memperjuangkan kepentingannya. Pada gilirannya, penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan dinamika yang terjadi di antara organisasi *civil society* dalam pro-kontra rencana reklamasi Teluk Benoa.

### 1.7.2 Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif di mana menurut John W. Cresswell terdapat beberapa dimensi asumsi paradigmatis dalam penelitian kualitatif yang mencakup ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Secara ontologis, peneliti kualitatif memandang realitas merupakan hasil rekonstruksi oleh individu yang terlibat dalam situasi

---

<sup>44</sup> Tendler. 1997 dalam Ibid. hal. 11-12

sosial. Kemudian dari segi epistemologi, peneliti kualitatif menjalin interaksi secara intens dengan realitas yang ditelitinya. Oleh karena itu secara retorik atau penggunaan bahasa kerap ditandai dengan penggunaan bahasa informal dan personal seperti “*understanding*”, “*discover*”, dan “*meaning*”. Penelitian kualitatif lebih mengutamakan penggunaan logika induktif di mana kategorisasi dilahirkan dari perjumpaan peneliti dengan informan di lapangan atau data-data yang ditemukan. Dengan demikian penelitian ini bercirikan informasi yang berupa ikatan konteks yang akan menuntun peneliti kepada pola-pola atau teori yang akan menjelaskan fenomena sosial.<sup>45</sup>

Sehubungan dengan orientasi dalam penelitian yang menggunakan metode kualitatif, terdapat empat orientasi penelitian menurut Lawrence Neuman. Orientasi pertama terkait dengan pendekatan yang digunakan terhadap data. Metode kualitatif memperlakukan data sebagai sesuatu yang bermakna secara intrinsik. Data dalam penelitian kualitatif bersifat “lunak”, tidak sempurna, immaterial, dan kabur. Namun demikian, data tersebut bersifat empiris yang terdiri dari dokumentasi ragam peristiwa, rekaman setiap ucapan, kata dan gestur dari objek kajian, tingkah laku yang spesifik, dokumen-dokumen tertulis, serta berbagai visual yang ada dalam sebuah fenomena sosial. Orientasi kedua adalah penggunaan perspektif yang non-positivistik atau dengan kata lain penelitian kualitatif menggunakan pendekatan interpretatif yang memfokuskan dirinya pada makna subjektif,

---

<sup>45</sup> John W. Cresswell. 1994 dalam Gumilar Rusliwa Somantri. 2005. *Memahami Metode Kualitatif*. Makara, Sosial Humaniora 9(2). hal. 58



pendefinisian, metafora, dan deskripsi pada kasus-kasus yang spesifik. Orientasi ketiga berhubungan dengan penggunaan logika penelitian yang bersifat “*logic in practice*”. Artinya penelitian dijalankan secara aktual, tidak teratur, lebih ambigu, dan terikat pada kasus-kasus spesifik serta hasil yang didapat dibangun oleh pengalaman-pengalaman di lapangan yang ditemukan oleh peneliti. Orientasi terakhir berkaitan dengan langkah-langkah penelitian yang bersifat non-linear, yaitu peneliti dihadapkan pada langkah-langkah penelitian yang bersifat tidak pasti dan tidak tetap dengan panduan yang tidak terikat sehingga lebih memberikan ruang bagi peneliti dan kadang kala melakukan upaya kembali pada langkah-langkah penelitian yang sudah ditempuhnya dalam menjalani proses penelitian guna mengklarifikasi data agar hasil temuan peneliti diakui validitasnya.<sup>46</sup>

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, peneliti berusaha mengkonstruksi realitas *civil society* dalam rencana reklamasi Teluk Benoa dan memahami dinamikanya sehingga penelitian kualitatif sangat memperhatikan proses dan peristiwa. Oleh karenanya, hal yang dilakukan adalah berkuat dengan analisis tematik dan peneliti terlibat langsung dalam interaksi dengan realitas *civil society*, baik mereka yang mendukung maupun menolak rencana reklamasi Teluk Benoa secara lebih mendalam, akurat, jelas, dan terperinci.

---

<sup>46</sup> Lawrence Neuman. 1997 dalam *Ibid.* hal. 60

### 1.7.3 Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah kelompok dengan perhatian utama pada organisasi *civil society*. Adapun organisasi *civil society* yang dimaksud adalah Yayasan Bumi Bali Bagus sebagai sebuah organisasi yang menaungi masyarakat pendukung rencana revitalisasi berbasis reklamasi di Teluk Bena dan Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBALI) sebagai induk organisasi yang mencakup berbagai kelompok masyarakat yang menentang rencana reklamasi Teluk Bena.

### 1.7.4 Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Teluk Bena sebagai kawasan yang akan direklamasi. Lokasi penelitian juga meluas hingga daerah di sekitar Teluk Bena, yaitu Kelurahan Bena dan Kelurahan Tanjung Bena. Di samping itu, untuk meneliti organisasi *civil society*, peneliti melakukan penelitian di Kota Denpasar dimana sekretariat ForBALI dan Kantor Yayasan Bumi Bali Bagus berada.

Peneliti mengambil *setting* penelitian di Teluk Bena didasari atas ketertarikan akan fenomena dinamika *civil society* yang terjadi di Bali yang telah berlangsung selama kurang lebih dua setengah tahun. Penelitian dengan memilih lokasi ini menjadi lebih menarik mengingat reklamasi yang pernah terjadi di di dekat Teluk Bena, yaitu Pulau Serangan yang tidak memberikan banyak manfaat bagi masyarakat lokal khususnya. Reklamasi di Pulau Serangan juga disebut-sebut sebagai reklamasi yang gagal karena

pada proses pengerjaannya tidak tuntas hingga sekarang. Pada gilirannya, reklamasi Serangan yang dielu-elukan akan meningkatkan pariwisata dan kesejahteraan masyarakat sekitar berubah menjadi mimpi buruk yang berdampak hingga saat ini.

Dengan demikian, penting bagi peneliti untuk memahami pesimisme masyarakat di sekitar Teluk Benoa khususnya pada rencana reklamasi Teluk Benoa yang didasari pada pengalaman pahit reklamasi yang kembali menebar janji yang sama. Di saat yang bersamaan, optimisme masih tumbuh dalam diri masyarakat dalam memperjuangkan rencana reklamasi agar segera terwujud menjadi fenomena yang mendapat perhatian peneliti. Sekali lagi, Teluk Benoa beserta daerah di sekitarnya dipilih peneliti sebagai lokasi penelitian karena daerah ini merupakan sumber permasalahan penelitian sekaligus merupakan tempat dimana *civil society* saling berusaha mempengaruhi masyarakat dan pemerintah sebagai sebuah kontestasi politik.

#### **1.7.5 Teknik Penentuan Informan**

Dalam menentukan informan sebagai subyek penelitian, peneliti memilihnya secara *purposive* dan *snow ball*. Dengan metode *purposive*, peneliti menentukan informan yang dipandang sesuai dengan topik kajian, yaitu informan yang memiliki dan menguasai informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam rangka memperluas data, peneliti meminta

rekomendasi dari informan sebelumnya hingga data-data yang diperlukan dianggap cukup untuk menjawab rumusan permasalahan.

### 1.7.6 Subyek Penelitian

Subyek penelitian yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini, meliputi pihak pemerintah, *civil society*, dan masyarakat lokal di sekitar Teluk Benoa. Adapun rinciannya sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Daftar Informan yang Diwawancarai**

No.	Nama Informan	Jabatan
1.	Ngakan Putu Kirim	Kepala Sub Bidang Penataan Ruang Bappeda Provinsi Bali
2.	Ida Ayu Indrawati	Kasi Perencanaan dan Pengawasan Teknik Tata Ruang dan Perumahan Dinas PU Provinsi Bali
3.	Komang Gede Subudi	Ketua Yayasan Bumi Bali Bagus
4.	I Gusti Ngurah Bagus Muditha	Pembina Yayasan Bumi Bali Bagus
5.	Ngurah Karyadi	Mantan Direktur WALHI Bali Aktivis Senior ForBALI
6.	Septyan Gita R.	Masyarakat Lokal Kelurahan Benoa
7.	Made Suardana	Petugas Kebersihan di sebuah Villa di Kelurahan Tanjung Benoa
8.	Informan 1	Pegawai Bappeda Provinsi Bali
9.	Informan 2	Nelayan Kelurahan Tanjung Benoa

Informan Ngakan Putu Kirim sebagai Kepala Sub Bidang Penataan Ruang Bappeda Provinsi Bali dengan detil menjelaskan mengenai latar belakang perubahan Perpres No. 45/2011 menjadi Perpres No.51/2014 yang mengubah fungsi Teluk Benoa dari kawasan konservatif menjadi kawasan budi daya yang dapat dimanfaatkan. Sedangkan Ida Ayu Indrawati di samping turut mempertegas perubahan Perpres yang akan diikuti oleh perubahan Perda, juga memberikan informasi yang lebih terbuka dimana beliau turut mengkritik kebijakan tersebut. Di lain pihak, salah satu pegawai Bappeda Provinsi Bali yang ingin identitasnya dirahasiakan mengungkapkan bahwa rencana reklamasi Teluk Benoa ini sangat bernuansa politis dimana jika ditelaah memiliki hubungan dengan pemilihan Gubernur Bali pada tahun 2013.

Kemudian informan yang berasal dari *civil society*, yaitu Komang Gede Subudi yang menjabat sebagai ketua Yayasan Bumi Bali Bagus dan Ngurah Karyadi yang merupakan mantan direktur WALHI Bali dan aktif sebagai aktivis senior ForBALI. Komang Gede Subudi menerangkan alasan-alasan mengapa masyarakat Bali perlu mendukung rencana reklamasi Teluk Benoa dan upaya yang telah dilakukan oleh yayasan dalam memperjuangkan dukungannya. Sebaliknya, Ngurah Karyadi memberikan informasi yang lebih mengarah pada kritik terhadap negara yang memanjakan investor. Selain itu, beliau juga memberikan informasi mengenai aktivitas ForBALI dalam menolak rencana reklamasi Teluk Benoa.



Terakhir, informasi juga didapatkan dari masyarakat lokal di sekitar kawasan Teluk Benoa, yaitu Septyan Gita Rusmawan yang berasal dari Kelurahan Benoa, Made Suardana dan seorang nelayan –yang tidak ingin namanya dipublikasikan– yang mencari penghasilan di Kelurahan Tanjung Benoa. Made Suardana dan nelayan tersebut memberi keterangan mengenai keadaan masyarakat lokal dalam menanggapi rencana reklamasi Teluk Benoa. Kemudian selain menjelaskan posisi masyarakat Kelurahan Benoa dalam merespon rencana reklamasi, secara khusus, Septyan Gita juga memaparkan propaganda-propaganda yang menyebar di masyarakat.

### 1.7.7 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti mengawali proses pengumpulan data melalui metode observasi tidak langsung atau dengan kata lain peneliti menggunakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang tampak pada obyek penelitian yang pelaksanaannya tidak langsung di tempat atau pada saat peristiwa, keadaan atau situasi itu terjadi.<sup>47</sup> Observasi tidak langsung dilakukan peneliti dengan maksud agar memahami kondisi *civil society* dalam rencana reklamasi Teluk Benoa dan mengenal subyek penelitian dengan baik terlebih dahulu sebelum terjun ke lapangan untuk diteliti lebih lanjut. Dalam melakukan observasi tidak langsung, peneliti dibantu dengan informasi sekunder, seperti surat kabar, situs resmi *stakeholder* (pemerintah bersama Yayasan

---

<sup>47</sup> Hadari Nawawi. 1993. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. hal. 95

Bumi Bali Bagus dan ForBALI sebagai *civil society*), dokumen-dokumen, dan kajian penelitian serupa. Di samping itu, peneliti juga menggunakan media internet sebagai bahan kajian dari pemberitaan online mengenai informasi teraktual yang sedang terjadi mengenai dinamika *civil society* dalam memperjuangkan aspirasinya menanggapi rencana reklamasi Teluk Benoa.

Setelah melakukan observasi tidak langsung, peneliti menggunakan metode observasi langsung dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dengan mengamati secara langsung kondisi perairan Teluk Benoa. Dengan pengamatan ini, peneliti mendapatkan bukti-bukti untuk menunjukkan kebenaran informasi yang disampaikan oleh para informan yang telah diwawancarai secara mendalam (*indepth interview*) sebelumnya. Metode wawancara mendalam seperti ini sifatnya tidak terstruktur sebagaimana menurut Deddy Mulyana, wawancara tidak terstruktur mirip dengan percakapan informal yang susunan kata dan urutannya disesuaikan dengan ciri-ciri informan.<sup>48</sup> Dengan model ini peneliti memiliki ruang yang lebih luas dalam menggali informasi dari informan jika dibandingkan dengan wawancara terstruktur yang terkesan formal dan terikat pada pedoman wawancara. Mulyana menambahkan bahwa wawancara tidak terstruktur bersifat luwes, susunan pertanyaan dan susunan kata-katanya dalam setiap pertanyaan dapat diubah saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara, termasuk karakteristik sosial-budaya (agama,

---

<sup>48</sup> Deddy Mulyana. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung. hal. 181

suku, gender, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, dsb.) informan yang dihadapi.<sup>49</sup>

### 1.7.8 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada dua kategori data, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun yang dimaksud dengan data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari informan melalui wawancara. Pada penelitian ini, peneliti memiliki delapan data primer yang didapat dari wawancara informan dimana lima informan didokumentasikan dalam rekaman suara dan transkrip wawancara. Sedangkan tiga sisanya tidak didokumentasikan dikarenakan perolehan data hanya dilakukan dengan wawancara tanpa merekam jawaban informan. Kemudian, data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari informan melainkan didapat dari sumber-sumber lain, berupa laporan penelitian, peraturan pemerintah, dan data digital yang didapatkan melalui unduhan dari *website* resmi investor dan organisasi *civil society*.

### 1.7.9 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data digunakan untuk menjawab rumusan masalah berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber di lapangan. Bogdan seperti yang dikutip Sugiyono mengatakan bahwa analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data yang

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain secara sistematis sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Selanjutnya, analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis yang berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber dikembangkan menjadi kesimpulan atau jawaban penelitian.<sup>50</sup>

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahap utama, yaitu: (1) reduksi data; (2) penyajian data; dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi. Proses analisis interaktif ini merupakan proses siklus di mana peneliti bergerak di antara proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi yang prosesnya berulang dan berlanjut secara terus-menerus selama dan setelah proses pengambilan data berlangsung. Kegiatan baru berhenti ketika penulisan akhir penelitian telah siap dikerjakan.<sup>51</sup>

Setelah pengumpulan data dilakukan sesuai dengan teknik pengumpulan data yang ditentukan sebelumnya, peneliti melakukan tahap pertama teknik analisis model interaktif Miles dan Huberman, yaitu reduksi data. Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan yang berlangsung

---

<sup>50</sup> Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung. hal. 244

<sup>51</sup> Miles dan Huberman. 1992 dalam Muhammad Idrus. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Edisi Kedua. Erlangga. Jakarta. hal. 147-152

secara terus-menerus selama penelitian. Tahap ini memungkinkan peneliti untuk melakukan kategorisasi data tentang bagian mana yang disimpan, dibuang, pola-pola mana yang meringkas sejumlah fenomena dan cerita-cerita yang berkembang sebagai pilihan-pilihan analitis. Proses reduksi data dimaksudkan untuk lebih menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang bagian data yang tidak diperlukan, serta mengorganisasi data sehingga memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan.

Langkah berikutnya adalah tahap penyajian data yang dapat dimaknai sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Artinya peneliti akan lebih mudah memahami fenomena yang sedang diteliti dan mengambil tindakan untuk menentukan langkah apa yang harus dilakukan berikutnya untuk memperdalam temuannya. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Miles dan Huberman menyebutkan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.<sup>52</sup>

#### **1.7.10 Sistematika Penulisan**

Penulisan hasil penelitian ini dirancang dalam empat bab yang ditulis secara sistematis. Bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,

---

<sup>52</sup> Miles dan Huberman. 1984 dalam Sugiyono, *Op.Cit.* hal. 249



kerangka teori, kerangka konseptual, dan metodologi penelitian yang mencakup fokus penelitian, tipe penelitian, unit analisis, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, subyek penelitian, jenis data, dan teknik analisis data.

Kemudian bab kedua memberikan informasi mengenai gambaran umum wilayah studi, yakni Teluk Benoa mencakup di dalamnya letak geografi dan administrasi Teluk Benoa, keadaan alam Teluk Benoa, kependudukan, mata pencaharian, konsep pengembangan Teluk Benoa oleh PT. TWBI, profil Yayasan Bumi Bali Bagus, dan profil ForBALI.

Bab ketiga menjelaskan tiga hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini. Pertama, isu-isu yang diangkat sebagai perjuangan *civil society* dalam rencana reklamasi Teluk Benoa. Kedua, cara-cara yang ditempuh oleh *civil society* untuk meyakinkan masyarakat umum dan pemerintah. Terakhir, dinamika yang terjadi antara pihak pendukung dan penentang dalam rencana reklamasi Teluk Benoa.

Terakhir pada bab keempat, peneliti memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan untuk menjawab rumusan permasalahan. Peneliti juga menambahkan saran pada bab ini dengan menunjukkan keterbatasan penelitian dan kemudian merekomendasikan aspek-aspek yang dapat diteliti bagi peneliti selanjutnya untuk melengkapi pembahasan mengenai *civil society* dalam rencana reklamasi Teluk Benoa.